



## PEMERINTAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882,  
Telepon (0765) 4300009, Faksimile (0765) 440093,  
Laman [dumaikota.go.id](http://dumaikota.go.id), Pos-el [umum@dumaikota.go.id](mailto:umum@dumaikota.go.id)

# 2023

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023



# R-LPPD

Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul  
dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"



[email. bag.tapendumai@gmail.com](mailto:bag.tapendumai@gmail.com)



PEMKO DUMAI

## *K*ata Pengantar

*P*uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*S*esuai pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 RLPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

*T*entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adalah menjadi harapan kita semua, bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

**Dumai, Maret 2024**

**WALIKOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	iv
<b>1. Capaian Kinerja Makro</b>	<b>1</b>
a. Indeks Pembangunan Manusia	1
b. Angka Kemiskinan	2
c. Angka pengangguran	4
d. Pertumbuhan Ekonomi	5
e. Pendapatan Per Kapita	10
f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	12
<b>2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar</b>	<b>13</b>
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)	15
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	37
<b>3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya</b>	<b>44</b>
<b>4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah</b>	<b>44</b>
<b>5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan</b>	<b>55</b>
<b>6. Inovasi Daerah</b>	<b>58</b>
<b>P E N U T U P</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

			<b>Hal</b>
Tabel	1	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022	1
Tabel	2	Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022	2
Tabel	3	Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	3
Tabel	4	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022	5
Tabel	5	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliarrupiah) 2018-2022	5
Tabel	6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen) 2018-2022	7
Tabel	7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2018-2022	8
Tabel	8	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2018-2022	9
Tabel	9	Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022	11
Tabel	10	Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2022	13
Tabel	11	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2023 dan Perwako No. 58 Tahun 2023	45
Tabel	12	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023	46
Tabel	13	Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023	54
Tabel	14	Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023	56
Tabel	15	Data Anggraran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2023	57
Tabel	16	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	59



PEMKO DUMAI

## DAFTAR GRAFIK

			<b>Hal</b>
Grafik	1	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2017-2022	1
Grafik	2	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	3
Grafik	3	Garis Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	4



## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 1. Capaian Kinerja Makro

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Selama periode 2018-2022 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (daya beli Masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2018 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2022 adalah sebesar 74,06 ; 74,64 ; 74,40; 74,75; 75,26.

Tabel. 1  
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional  
Tahun 2018-2022

Cakupan Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Dumai	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26
Provinsi Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
Nasional	71,39	71,92	71,92	72,29	72,91

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023)

Grafik. 1  
Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional  
Tahun 2017-2022



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023 )



Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2022, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 10 dibawah. Pada tahun 2022, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru yang memiliki angka IPM dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dumai, Kuantan Senggigi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir memiliki angka IPM dengan kategori tinggi.

Tabel. 2  
Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau  
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60	71,09
Indragiri Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01	70,46
Indragiri Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63	67,37
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08	72,93
Siak	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98	74,50
Kampar	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02	73,84
Rokan Hulu	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67	70,31
Bengkalis	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58	74,38
Rokan Hilir	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34	70,10
Kepulauan Meranti	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70	66,52
Pekanbaru	79,97	80,66	81,35	81,32	81,58	82,06

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023)

## b. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan criteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolute adalah ukuran angka atau hitungan perkepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan



absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2017-2022 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19 seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini.

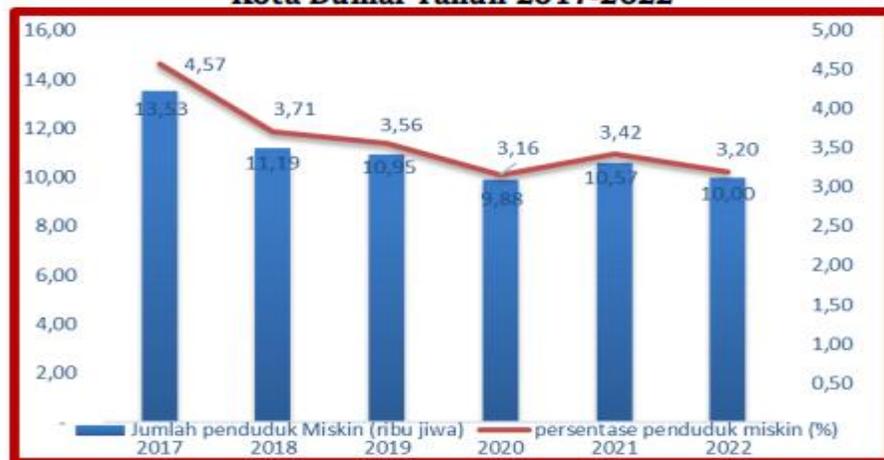
Tabel. 3  
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20

Sumber : BPS

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 5,26% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin.

Grafik. 2  
Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023)

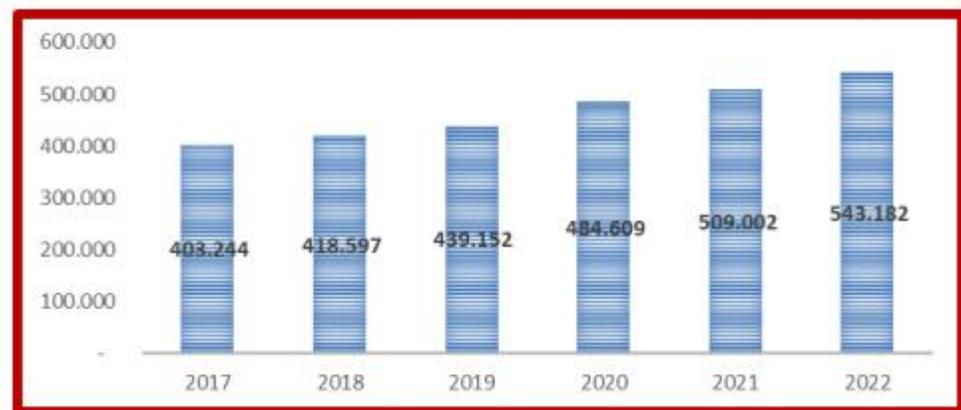
Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.543.182/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk



mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk developing countries. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskina dan indeks keparahan kemiskinan

Grafik. 3  
**Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022**



### c. Angka pengangguran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang butuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).



Tabel. 4

**Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022**

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997

Sumber : BPS

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang mengGrafikkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang mengGrafikkan andil masing-masing sektor.

PDRB atas harga harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2018-2022 Kota Dumai sebagai berikut :

**Tabel. 5**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliarrupiah), 2018–2022**

Lapangan Usaha/Industry (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1875,18	1923,18	2079,21	2303,17	2452,76
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	120,04	128,17	129,55	132,99	139,35
c Industri Pengolahan/Manufacturing	18660,48	20867,98	21772,85	24294,17	27843,51



PEMKO DUMAI

D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	28,10	31,77	73,72	92,98	140,55
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,88	5,33	5,60	6,04	6,60
F	Konstruksi/Construction	3786,76	4049,17	3941,63	3995,66	4510,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5413,96	5736,85	5258,19	5873,68	6350,00
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	973,79	1055,62	726,59	757,62	889,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	303,73	319,40	260,31	314,99	335,60
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	380,26	418,39	457,24	478,07	500,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	390,06	397,13	409,20	449,22	517,34
L	Real Estat/Real Estate Activities	153,05	161,76	164,08	168,40	182,03
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,84	2,06	1,63	1,65	1,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	568,68	587,76	590,24	605,35	667,05
P	Jasa Pendidikan/Education	161,94	177,13	185,34	192,27	199,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	56,82	65,84	77,38	86,28	93,68
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	196,64	220,03	181,04	193,57	225,57
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>33 076,21</b>	<b>36 147,14</b>	<b>36 313,70</b>	<b>39 946,11</b>	<b>45 056,39</b>

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2022 adalah 27.725.880,00 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2021 adalah 26.068.270,00 (juta rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :



**Tabel. 6**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga**  
**Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen),**  
**2018–2022**

	Lapangan Usaha/Industry (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry, and Fishing	2,77	2,01	4,15	3,97	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-3,75	2,31	-1,32	0,65	2,06
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	3,18	7,29	138,30	26,75	42,88
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,09	6,18	4,05	7,79	8,13
F	Konstruksi/Construction	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1,91	2,87	-10,30	9,02	3,33
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	6,46	3,72	-19,49	19,10	4,57
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	2,09	0,11	3,44	4,47	5,03
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,81	5,29	1,63	2,60	5,36
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	9,65	7,20	-21,64	0,95	1,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,29	2,32	-2,16	2,15	9,05
P	Jasa Pendidikan/Education	3,94	5,62	1,41	2,56	2,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,56	10,83	14,62	10,33	4,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12



<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>5,34</b>	<b>5,60</b>	<b>-1,04</b>	<b>5,98</b>	<b>6,36</b>
---	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Indeks implisit di Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 153,44 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada tahun 2022 sebesar 3,90 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel. 7**  
**Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2018–2022**

<b>Lapangan Usaha/Industry</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	153,29	154,14	159,96	170,43	181,24
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	156,43	163,26	167,23	170,56	175,11
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	137,16	143,11	144,96	151,78	161,50
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	157,52	165,96	161,64	160,83	170,16
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D ur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	131,02	134,75	136,43	136,38	137,86
F Konstruksi/Construction	160,45	164,73	165,35	167,53	180,28
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	133,91	137,92	140,96	144,43	151,11
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	144,07	148,23	156,10	162,08	174,44
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	174,21	176,63	178,81	181,68	185,10
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	132,27	135,75	135,81	136,36	138,89



PEMKO DUMAI

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	144,23	146,68	146,11	153,54	168,35
L	Real Estat/Real Estate Activities	148,31	148,87	148,59	148,63	152,49
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	147,95	153,12	155,84	154,89	162,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	131,52	132,85	136,35	136,90	138,34
P	Jasa Pendidikan/Education	159,43	165,11	170,36	172,34	174,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	156,56	163,71	167,85	169,65	176,46
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	156,13	160,59	165,23	166,91	171,95
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>140,52</b>	<b>145,42</b>	<b>147,63</b>	<b>153,24</b>	<b>162,51</b>

**Tabel. 8**  
**Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kota Dumai (persen), 2018–2022**

	<b>Lapangan Usaha/Industry</b> (1)	<b>2018</b> (2)	<b>2019</b> (3)	<b>2020</b> (4)	<b>2021*</b> (5)	<b>2022**</b> (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,00	0,56	3,77	6,55	6,34
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6,79	4,37	2,43	1,99	2,67
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4,49	4,34	1,29	4,71	6,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,49	5,36	-2,60	-0,50	5,80
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,70	2,84	1,25	-0,04	1,08
F	Konstruksi/Construction	4,49	2,67	0,38	1,32	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1,18	2,99	2,20	2,46	4,62
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,09	2,89	5,30	3,83	7,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	1,60	1,39	1,24	1,60	1,88



J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	7,76	2,63	0,04	0,41	1,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,77	1,70	-0,39	5,09	9,64
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,90	0,38	-019	0,03	2,60
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,73	3,49	1,78	-0,61	4,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,50	1,01	2,64	0,40	1,05
P	Jasa Pendidikan/Education	0,48	3,56	3,18	1,16	1,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,66	4,57	2,53	1,07	4,01
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,35	2,85	2,89	1,02	3,02
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>3,48</b>	<b>3,49</b>	<b>1,52</b>	<b>3,80</b>	<b>6,05</b>

#### e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah. Sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional. bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional. tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.



Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab. Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Selama periode 2017–2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 35,90 juta/Kapita tahun 2017 meningkat menjadi Rp 43,67 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,06% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2017-2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,92 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp. 24,86 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,81% per tahun.

**Tabel 9**  
**Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022**

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>PDRB-ADHB</b>								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
<b>PDRB-ADHK</b>								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran, 2017-2022 dan Olahan)



Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah tuntutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\begin{aligned} PDRB \text{ perkapita}_{(ADHB)} &= \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}} \\ &= \frac{45.056.390.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 135.781.000/Kapita} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} PDRB \text{ perkapita}_{(ADHK)} &= \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}} \\ &= \frac{27.725.880.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 83.554.000/Kapita} \end{aligned}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil. Adapun perkiraan Pendapatan perkapita pada tahun 2024 untuk ADHB berkisar antara 141,187 juta/kapita-147,232 juta/kapita sedangkan untuk ADHK 85,21 juta/kapita-85,66 juta/kapita.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan



mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (Muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:  $G > 0,5$  ketimpangan tinggi,  $0,35 < G < 0,5$  ketimpangan sedang,  $G < 0,35$  ketimpangan ringan.

Tabel 10

**Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2022**

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,324

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

## 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada Urusan Wajib dibagi atas Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkat Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan
2. kesehatan
3. pekerjaan umum dan penataan ruang
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan



PEMKO DUMAI

## 6. sosial

Dalam pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2022 berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).



PEMKO DUMAI

## 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

### a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi Negeri/swasta	<i>Sudah cukup jelas</i>	92	DISDIK	PAUD 115 SP
		2	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yg menerima pelengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		3	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD Negeri/swasta	<i>sda</i>	348	DISDIK	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri/swasta)	<i>sda</i>	482	DISDIK	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV / S.1 bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain / psikologi dan sertifikat profesi guru pendidik anak usia dini	<i>sda</i>	216		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki jajah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	<i>sda</i>	76	DISDIK	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	145	DISDIK	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang	<i>Sda</i>	-	DISDIK	



PEMKO DUMAI

		menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				
	10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.714	DISDIK	
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.651	DISDIK	
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	114	DISDIK	
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	181	DISDIK	
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.409	DISDIK	
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	964	DISDIK	
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	576	DISDIK	
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	337	DISDIK	
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.128	DISDIK	



PEMKO DUMAI

22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		861	DISDIK	
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		109	DISDIK	
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		36	DISDIK	
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	152	DISDIK	
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	78	DISDIK	
27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	145	DISDIK	
28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.714	DISDIK	
31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.651	DISDIK	



PEMKO DUMAI

	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	114	DISDIK	
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	181	DISDIK	
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.409	DISDIK	
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	964	DISDIK	
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	576	DISDIK	
	39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	337	DISDIK	
	40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	2.128	DISDIK	
	41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	861	DISDIK	
	42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	109	DISDIK	
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	36	DISDIK	
	44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki	<i>sda</i>	152	DISDIK	



PEMKO DUMAI

			ijazah SMA/ sederajat				
		45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	78	DISDIK	
		46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan swasta)	<i>sda</i>	6	DISDIK	
		47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	86	DISDIK	
		49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	24	DISDIK	
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	<i>sda</i>	216	DISDIK	
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	109	DISDIK	
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	<i>sda</i>	5	DISDIK	
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	<i>sda</i>	3	RSUD	
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<i>sda</i>	5	RSUD	
		3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.590	Diskes



PEMKO DUMAI

		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	<i>sda</i>	591	Diskes	
	4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.154	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
	5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.718	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
	6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	44.931	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
	7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	55.082	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
	8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	209.297	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
	9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	15.356	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
	10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	72.263	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	622	Diskes	
	11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	3.819	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	<i>sda</i>	622	Diskes	



PEMKO DUMAI

			kesehatan sesuai standar					
		12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	498	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
		13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.208	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	330	Diskes	
		14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.851	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	330	Diskes	
<b>3</b>	PU dan PR	1	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	724 ha	PUPR	
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
			6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah</i>	21 pintu air 18 rumah pompa	PUPR	
	2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	<i>Sudah cukup jelas</i>	100%	PUPR	(19.400/ 19.400)x 100%
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	100%	PUPR	(17.410/ 17.410)x 100%
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kabupaten/Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah</i>	-	PUPR	
	3	1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	<i>Ada/tdk</i>	1 Dok	PUPR	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	Tidak	PUPR	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	<i>Sudah cukup jelas</i>	1	PUPR	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	<i>Sda</i>	1	PUPR	
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	<i>Sda</i>	3	PUPR	KBPU, B TOEL IKK MEDANG KAMPAT DAN



PEMKO DUMAI

						NUWSP
4	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	<i>Sda</i>	81.272	PUPR	
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<i>Sda</i>	1.003	PUPR	
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	<i>Sda</i>	82.275	PUPR	
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-	PUPR	data ada di Dinkes
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-	PUPR	
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	<i>Sda</i>	300.260	PUPR	
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ Rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki seftik Rumah diwilayah pengembangan spald dg kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 $\Sigma$ $\times 100 \%$	81%	PUPR	
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\Sigma$ rumah yg lumpur tinjanya yg telah diolah di IPLT Rumahdiwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pd wilayah terbangun > 25 $\Sigma$ Jiwa/ha	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD $\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDT sda $\times 100\%$		1%	PUPR	
			10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat $\times 100\%$ $\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		81%	PUPR	
			11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia $\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota $\times 100\%$		2	PUPR	
			12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia $\times 100\%$ $\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	1 Unit kapasitas 10 m3/hari	50%	PUPR	
			13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	450 rumah	82%	PUPR	



PEMKO DUMAI

				$x100\%$ <i>jumlah rumah yang dilayani Σ dengan SPALD-T pada kab/kota</i>				
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Σ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot <math>x100\%</math> Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S</i>		-	PUPR	data ada di Dinkes
	6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	<i>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)</i>		-	PUPR	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	<i>Sudah cukup jelas</i>		-	PUPR	data ada di DPMPTSP
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	<i>Ada/tdk</i>		Perda no 1 tahun 2016 tentang bangunan gedung	PUPR	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	<i>Ada/tdk</i>		Tim Pengkaji Ahli (TPA)	PUPR	
		5	Jumlah bangunan gedung yang	<i>Sudah cukup jelas</i>		-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			
	6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	<i>sda</i>	-	PUPR
	7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	<i>sda</i>	13	PUPR
	8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/ kota yang dipelihara/dirawat	<i>sda</i>	8	PUPR
7	1		Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>	1.198.243 KM	PUPR
	2		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan kota		-	
	3		Panjang jalan yang dibangun	<i>Sudah cukup jelas</i>	25,30 km	PUPR
	4		Panjang jembatan yang dibangun	<i>sda</i>	50 mtr	PUPR
	5		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	<i>sda</i>	0	PUPR
	6		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	<i>sda</i>	0	PUPR
	7		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	<i>sda</i>	0	PUPR
	8		Panjang jembatan yang direhabilitasi	<i>sda</i>	50 mtr	PUPR
	9		Panjang jalan yang dipelihara	<i>sda</i>	2,79 km	PUPR
	10		Panjang jembatan yang dipelihara	<i>sda</i>	-	PUPR
8	1		Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>	-	PUPR
	2		Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	3		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data teremutakhir	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR
	5		Tersedianya data dan informasi potensi	<i>sda</i>	-	PUPR



PEMKO DUMAI

			pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD Kab/Kota				
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	<i>sda</i>	-	PUPR	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	<i>sda</i>		PUPR	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	<i>sda</i>	-	PUPR	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	<i>sda</i>	-	PUPR	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang	<i>sda</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota				
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR	
		23	Jumlah pengawasan terkait	<i>sda</i>		PUPR	



PEMKO DUMAI

			ketidaksiuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya					
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksiuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	<i>sda</i> -	-	PUPR		
4	Perumahan Rakyat	1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	<i>Sudah cukup jelas sda</i>	1.430	Perkimtan	
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			3	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	Perkimtan	
			4	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			6	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			8	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang tergasilitasi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			9	Jumlah, luasan dan lokasi percadangan lahan	<i>sda</i>	17,34 ha	Perkimtan	
			2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan	<i>Sudah cukup jelas</i>	0	Perkimtan



PEMKO DUMAI

			rencana pemenuhan SPM			
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan
		5	Jumlah rumah tangga Penerima layanan yang Belum mendapatkan Penyediaan rumah layak Huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan
		6	Jumlah total luasan (Ha) Pengadaan tanah	<i>sda</i>	0 Ha	Perkimtan
	3	1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	<i>Sudahcukupjelas</i>	12.98 Ha	Perkimtan
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	<i>sda</i>	213	Perkimtan
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	<i>sda</i>	24.85 Ha	Perkimtan
	4	1	Jumlah rumah di kab/kota	<i>Sudahcukupjelas</i>	48.888	Perkimtan
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	<i>sda</i>	213	Perkimtan
		3	Jumlah rumah tidak Layak huni	<i>sda</i>	9.739	Perkimtan
		4	Jumlah rumah yang Tidak dihuni	<i>sda</i>	-	Perkimtan
		5	Rasio rumah dan KK	<i>Jumlah KK</i> <i>Jumlah total unit rumah x 100%</i>	<u>(79.151</u> 48.888) x	Perkimtan



PEMKO DUMAI

					100% = 1.6%		
		6	Jumlah rumah Pembangunan baru	<i>sda</i>	65	Perkimtan	
	5	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	<i>Sudah cukup jelas</i>	59	Perkimtan	
		2	Jumlah unit rumah yang Sudah difasilitasi air minum	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		3	Jumlah unit rumah yang Terfasilitasi jalan lingkungan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		4	Jumlah unit rumah yang Terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		6	Jumlah unit rumah yang Terfasilitasi akses PJU	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat Penyuluhan atau pelatihan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
<b>5</b>	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	<i>Sudah cukup jelas</i>	1755	SATPOL PP
			2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	<i>sda</i>	0	SATPOL PP
			3	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi	<i>sda</i>	11	SATPOL PP
			4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	<i>sda</i>	16	SATPOL PP
			5	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas	<i>Ada/tdk</i>	3	SATPOL PP



PEMKO DUMAI

			sebagai PPNS				
		6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	<i>sda</i>	6	SATPOL PP	
	2	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}}$	100%	BPBD	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}$	100%	BPBD	
				$\frac{3.0}{56}$			
				$\frac{3.0}{56}$			
	3	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}$	0%	BPBD	
				$\frac{0}{0}$			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}$	0%	BPBD	
				$\frac{0}{0}$			
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelathan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}}$	0.0009 %	BPBD	
				$\frac{58}{51}$			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	8.84%	BPBD	
				$\frac{27}{308}$			
				$\frac{27}{308}$			
		5	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}$	25,26%	BPBD	
				$\frac{77}{302}$			



PEMKO DUMAI

			penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{3.0}{56}$			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	jumlahwarga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{16}{8}$ $\frac{3.0}{56}$	4,50%	BPBD	
	4	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{36}{36}$	100%	BPBD	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban yang berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{8}{8}$	100%	BPBD	
	5	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas		160	BPBD	



PEMKO DUMAI

		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak	Tidak	BPBD		
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Dibuat dalam bentuk daftar	0	BPBD		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	0	BPBD		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<i>Sudah cukup jelas</i>	247	BPBD		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	9	BPBD		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	127	BPBD		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	9	BPBD		
6	Sosial	1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	1.860	DINAS SOSIAL	
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<i>sda</i>	2.283	DINAS SOSIAL	
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<i>sda</i>	2.283	DINAS SOSIAL	
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

			husus layanan kedaruratan yang dimiliki				
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakaman sesuai standar gizi	<i>sda</i>	261	DINAS SOSIAL	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<i>sda</i>	76	DINAS SOSIAL	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<i>sda</i>	6	DINAS SOSIAL	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
	2	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

			anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan				
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<i>sda</i>	36	DINAS SOSIAL	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<i>sda</i>	105	DINAS SOSIAL	
	3	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	<i>sda</i>	468	DINAS SOSIAL	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	468	DINAS SOSIAL	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	<i>Ada/tidak</i>	0	DINAS SOSIAL	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	



## b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	RUMUS		Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(5.317/13.492) x 100%	39,40%	DISDIK	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(36.699/41.684) x 100%	88,04%	DISDIK	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(14.500/20.354) x 100%	71,23%	DISDIK	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(1.009/1.009) x 100%	100%	DISDIK	
		5	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budayayang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budayayang terdata}} \times 100\%$	(5/24) x 100%	20,83%	DISDIK	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung rumah sakit	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}$	$\frac{595}{335.303}$	0,18 %	RSUD	



			<i>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota</i>				
2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi		<i>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</i>	$(4/5) \times 100$	80 %	RSUD	
			<i>Jumlah RS di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
3	persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan		<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	$(8.688 / 9.590) \times 100$	90,59 %	DISKES	
			<i>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
4	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>	$(8.319 / 9.154) \times 100$	90,88 %	DISKES	
			<i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
5	persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(8.166 / 8.718) \times 100$	93,67%	DISKES	
			<i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
6	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan		<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(38.172 / 44.931) \times 100$	84,96 %	DISKES	
			<i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
7	persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan		<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(41.397 / 55.082) \times 100$	75,16%	DISKES	
			<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skining kesehatan		<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	$(196.643 / 209.297) \times 100$	93,95%	DISKES	
			<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
9	persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan		<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	$(14.382 / 15.356) \times$	93,66%	DISKES	



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	100			
		10	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Jumlah penderita hipertensi dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	$(38.374 / 72.563) \times 100$	52,88 %	DISKES	
		11	persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Jumlah penderita DM dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	$(3.736 / 3.819) \times 100$	97,83 %	DISKES	
		12	persentase ODGJ berat mendapatnkan pelayanan kesehatan jiwa	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Jumlah penderita ODGJ dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	$(531/ 498) \times 100$	106,63 %	DISKES	
		13	persentase orang yang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC	<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Jumlah penderita TBC dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	$(14.344/ 8.208) \times 100$	174,76 %	DISKES	
		14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> <i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$	$(11.368/ 9.851) \times 100$	115,40%	DISKES	
3	PU dan PR	15	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> <i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> $\times 100$	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan atas WS



PEMKO DUMAI

16	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)</i>	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan Pengamanan Pantai
		<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha) x 10</i>				
17	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)</i>	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	
		<i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota x 100%</i>				
10	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i>	$(\frac{92.676}{97.423}) \times 100\%$	95.12%	Dinas PUPR	
		<i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100%</i>				
11	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i>	$(\frac{64.248}{77.342}) \times 100\%$	83.07%	Dinas Kesehatan	
		<i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota x 100%</i>				
12	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i>	$(\frac{189}{189}) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	
		<i>Jumlah IMB yang berlaku x 100%</i>				



PEMKO DUMAI

		13	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<i>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</i> <i>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota x 100%</i>	$\frac{(636.129}{1.198.243)} \times 100\%$	53.08%	Dinas PUPR		
		14	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i> <i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i>	$\frac{(1/1)}{100\%}$	100%	Dinas PUPR		
		15	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i> <i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%</i>	$\frac{(859}{859)} \times 100\%$	100%	Dinas PUPR		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Peyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i>	0	0	Dinas Perkim	Pada th 2023 tdk bencana alam dan relokasi	
				<i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%</i>	1				
		15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi progam pemerintah kabupaten/kota	<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i>	0	0	Dinas Perkim		Pada th 2023 tdk bencana alam (uu no.24 th 2007) dan relokasi
				<i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%</i>	1				
16	Persentasi kawasan kumuh 10 – 15 Ha di kab/kota yang ditangani	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i>	24.85	59.84%	Dinas Perkim				
		<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%</i>	41.53						
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni</i>	6.444	13,18%	Dinas				



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%</i>	48.888)X 100%		Perkim	
		18	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i> <i>Jumlah unit rumah kab/kota x 100%</i>	(0 48.888)X 100%	0	Dinas Perkim	
5	Trantibum dan Linmas	18	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	(45 45)X100 %	100%	Satpol PP	
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi}} \times 100\%$	(49 49)X100 %	100%	Satpol PP	
		20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sudah jelas		3.056	BPBD	
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sudah jelas		3.056	BPBD	
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sudah jelas		772	BPBD	
		23	Persentase jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>	(42 46)x100 %	91.30%	BPBD	



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%</i>				
		24	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Sudah jelas		15 Menit	BPBD	
6	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	2.283/2.283 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
				<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%</i>				
		24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i>	468/468 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
		<i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x 100%</i>						



### 3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi dari tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri, diperoleh dari penilaian indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, Pemerintah Kota Dumai memperoleh skor 2.8206 dengan status kinerja berprestasi **Sedang** dan mendapatkan peringkat ke **3 (tiga)** dari 12 Kabupaten/Kota se Propinsi Riau pada tahun 2022, dan untuk tingkat Nasional mendapatkan peringkat ke **67**.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Juni 2023 Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Riau (BPK-RI) mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2022 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

### 4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah

#### a. Target Dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp 1.965.295.001.998,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 587.104.026.354,00,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.378.190.975.644,00,-

*Tabel 11. Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023*  
Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2023 dan Perwako No. 58 Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>587.104.026.354,00</b>
	Pajak Daerah	344.012.723.810,00
	Retribusi Daerah	58.521.865.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.598.930.665,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	176.970.506.879,00
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.378.190.975.644,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00



	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00
<b>Jumlah .....</b>		<b>1.965.295.001.998,00</b>

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah 2023 (Un Audited BPK RI)

Adapun rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

*Tabel 12.*

**Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023**

Kode Rek	Jenis	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran 2023	Realisasi T.A 2023	Jumlah (Rp)	Capaian Realisasi (%)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,965,295,001,998.00</b>	<b>1,910,196,168,051.00</b>	<b>(55.098.833.947,00)</b>	<b>97,20</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>587,104,026,354.00</b>	<b>566,032,272,368.00</b>	<b>(21.071.753.986,00)</b>	<b>96,41</b>
<b>4.1.01</b>	Pajak Daerah	344,012,723,810.00	358,508,134,419.00	14.495.410.609,00	104,21
<b>4.1.02</b>	Retribusi Daerah	58,521,865,000.00	43,131,076,576.00	(15.390.788.424,00)	73,70
<b>4.1.03</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,598,930,665.00	1,215,970,725.00	(6.382.959.940,00)	16,00
<b>4.1.04</b>	Lain-lain PAD yang Sah	176,970,506,879.00	163,177,090,649.00	(13.793.416.230,00)	92,91
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,378,190,975,644.00</b>	<b>1,344,163,895,683.00</b>	<b>(34.027.079.961,00)</b>	<b>97,53</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,154,682,091,884.00</b>	<b>1,176,303,738,791.00</b>	<b>21.621.646.907,00</b>	<b>101,87</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,108,207,700,884.00	1,129,829,347,791.00	21.621.646.907,00	101,95
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	46,474,391,000.00	46,474,391,000.00	-	100,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>223,508,883,760.00</b>	<b>167,860,156,892.00</b>	<b>(55.648.726.868,00)</b>	<b>75,10</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	215,980,883,760.00	160,348,644,092.00	(55.632.239.668,00)	74,24
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,528,000,000.00	7,511,512,800.00	(16.487.200,00)	99,78

Sumber: Data Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Un Audited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, rinciannya adalah sebagai berikut :



## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 Perubahan ditargetkan sebesar Rp 578.104.026.354,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 566.032.272.368,00- atau 96,20% dari target semula. Adapun rincian PAD adalah sebagai berikut :

### a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 344.012.723.810,00- terealisasi sebesar Rp 358.508.134.419,00- atau 104,21% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 5.200.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 5.762.552.942,00- atau 110,82% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah adanya penambahan objek Pajak Hotel yang baru dan tingkat penerimaan omset hotel meningkat.
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 13.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 14.551.177.086,00- atau 111,93% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset restoran meningkat.
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 2.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.302.317.1451,00- atau 115,12% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini karena naiknya penerimaan omset Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 3.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp .082.904.899,00- atau 102,76% dari target semula, hal ini disebabkan meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.



5. Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 52.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 53.722.513.233,00- atau 103,13% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN.
6. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 850.000.000,00- dan realisasi sebesar Rp. 988.421.103,00- atau 116,28 % dari target semula.
7. Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp 1.250.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.471.427.858,00- atau 117,71% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan air tanah ini disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 102.842.310,00- atau 102,84% dari target semula.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 159.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 161.190.234.668,00- atau 101,38% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 107.562.723.810,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 115.207.227.603,00- atau 107,11% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena terjadi peningkatan transaksi jual beli tanah di Tahun 2023 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak.



b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 58.521.865.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 43.131.076.576,00- atau 73,70% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 8.829.475.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.805.521.786,00- atau 31,77%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapai target adalah sebagai berikut:
  - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 787.438.000,00- atau 78,74% dari target semula.
  - b) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 3.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 677.420.000,00,- atau 22,58% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:  
Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
  - c) Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 341.151.000,00- atau 27,29% dari target semula.
  - d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 2.329.475.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 150.884.786,00- atau 6,48% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan adalah disebabkan:
    - Masyarakat luas belum memiliki kesadaran untuk melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.



- Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
  - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit, seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.
  - Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
  - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik, sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
- e) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi ditargetkan sebesar Rp 250.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 255.776.000,00- atau 102,31% dari target semula.
- f) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 592.852.000,00- atau 59,29% dari target semula
2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp. 33.675.440.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 24.151.942.250,00,- atau 71,72%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 168.000.000,00- atau 33,60%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
- Restribusi Pemakaian Alat dengan ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi pencapaian tahun 2023 sebesar Rp 168.000.000,00- atau 33,60%



- b) Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp 575.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 125.960.000,00- atau 21,91% dari target semula. Retribusi Terminal ini meliputi:
- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha target sebesar Rp 575.000.000,00,- dan realisasi sebesar Rp 125.960.000,00- atau 21,91%.
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 31.500.000.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 23.640.432.500,00- atau 75,05% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena:
- Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, karena tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, belum mencapai target.
- d) Restribusi Tempat Penginapan/ Peanggarahan/Vila ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 16.350.000,00 atau 32,70% dari target semula.
- e) Retribusi Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 25.440.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 17.960.000,00- atau 70,60% dari target semula.
- f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 156.929.750,00- atau 15,69% dari target semula.
- g) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 26.300.000,00- atau 105,20% dari target semula.
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 26.300.000,00- atau 105,20% dari target semula.



3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 16.016.950.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 16.173.612.540,00- atau 100,98%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah tercapainya target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditargetkan sebesar Rp 16.005.000.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 16.144.612.540,00- atau 100,87% dari target semula.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Tahun 2023 sebesar Rp. 7.598.930.665,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.215.970.725,00- atau 16,00% dari target semula. Rincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :
1. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp. 7.598.930.665,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.215.970.725,00- atau 16,00% dari target semula.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 176.970.506.879,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 163.177.090.649,00 atau 92,21% dari target semula.

## **2. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.378.190.975.644,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.344.163.895.683,00- atau 97,53% pada Pendapatan Daerah tahun 2023. Penerimaan ini terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 1.154.682.091.884,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.176.303.738.791,00- atau 101,57% dari target semula. Penerimaan ini terdiri dari :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak



Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 475.431.021.351,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 504.507.844.598,00- atau 106,1224% dari target semula.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp. 449.062.021.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 448.604.069.635,00- atau 99,90% dari target semula.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp. 47.833.870.600,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 47.075.071.699,00- atau 98,41% dari target semula.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp. 135.880.787.933,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 129.642.361.8597,00- atau 95,41% dari target semula.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp. 46.474.391.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 46.474.391.000,00- atau 100% dari target semula.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp. 223.508.883.760,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 167.860.156.892,00- atau 75,24% dari target semula.

**b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, Modal dan tak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.027.712.611.612,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.053.059.802,66 atau 96,02%. Pelaporan



realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.

*Tabel 13.*  
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran 2023	Realisasi T.A 2023	Jumlah (Rp)	Capaian (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,027,712,611,612.00</b>	<b>1,947,053,059,802.66</b>	<b>(80.659.551.809,34)</b>	<b>96.02</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,511,664,542,507.00</b>	<b>1,453,409,582,381.98</b>	<b>(58.254.960.125,02)</b>	<b>96.15</b>
Belanja Pegawai	701,433,610,737.00	676,986,867,844.60	(24.446.742.892,40)	96.51
Belanja Barang dan Jasa	732,536,338,077.00	700,247,720,233.49	(32.288.617.843,51)	95.59
Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	(561.000.000,00)	88,07
Belanja Hibah	67,885,243,693.00	67,168,778,858.89	(716.464.834,11)	98.94
Belanja Bantuan Sosial	5,109,350,000.00	4,866,700,000.00	(242.650.000)	95.25
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>515,915,960,853.00</b>	<b>493,541,316,697.68</b>	<b>(22.374.644.155,32)</b>	<b>95.66</b>
Belanja Modal Tanah	4,659,332,850.00	4,474,680,000.00	(184.652.850)	96.04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,933,352,078.00	99,265,340,501.15	(1.668.011.576,85)	98.35
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133,918,553,470.00	125,625,416,264.67	(8.293.137.205,33)	93.81
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	270,730,334,650.00	258,451,537,963.86	(12.278.796.686,14)	95.46
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5,674,387,805.00	5,724,341,968.00	(49.954.163,00)	100.88
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>132,108,252.00</b>	<b>102,160,723.00</b>	<b>(29.947.529,00)</b>	<b>77.33</b>
Belanja Tidak Terduga	132,108,252.00	102,160,723.00	(29.947.529,00)	77.33
<b>SURPLUS/ DEFISIT)</b>	<b>(62,417,609,614.00)</b>	<b>(36,856,891,751.66)</b>	<b>(25.560.717.862,34)</b>	<b>59.05</b>

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Data Un Audit (per 31/12/2023) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, BPKAD Kota Dumai

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 tersebut terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.511.664.542.507,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.453.409.582.381,98 atau 96,15% yang dialokasikan melalui :



- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 701,433,610,737.00 dengan realisasi sebesar Rp.676,986,867,844.60 atau 96.51%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 732,536,338,077.00 dengan realisasi sebesar Rp.700,247,720,233.49 atau 95.59%.
- c) Belanja Bunga sebesar Rp 4.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.139.515.445,00 atau 88,07%.
- d) Belanja Hibah sebesar Rp. 67,885,243,693.00 dengan realisasi sebesar Rp. 67,168,778,858.89 atau 98.94%.
- e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.5,109,350,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,866,700,000.00 atau 95.25%.

## 2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. **515,915,960,853.00** dengan realisasi sebesar Rp. **493,541,316,697.68** atau **95.66%** yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 4,659,332,850.00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,474,680,000.00 atau 96.04%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 100,933,352,078.00 dengan realisasi sebesar Rp. 99,265,340,501.15 atau 98.35%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 133,918,553,470.00 dengan realisasi sebesar Rp. 125,625,416,264.67 atau 93.81%.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 270,730,334,650.00 dengan realisasi sebesar Rp. 258,451,537,963.86 atau 95.46%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5,674,387,805.00 dengan realisasi sebesar Rp. 5,724,341,968.00 atau 100.8%

## 3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 132,108,252.00 dengan realisasi sebesar Rp. 102,160,723.00 atau 77.33% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 132,108,252.00 dengan realisasi sebesar Rp. 102,160,723.00 atau 77.33%



## 5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

### a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp 1.965.295.001.998,00,- realisasi sebesar Rp 1.910.196.168.052,00- tingkat capaian 97,20%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 587.104.026.354,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 566.032.272.368,00,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.378.190.975.644,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.344.163.895.683,00,-

Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14.  
Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut  
Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2023	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.965.295.001.998,00	1.910.196.168.052,00	97,20
<b>I</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.104.026.354,00	566.032.272.368,00	96,41
<b>A</b>	Pajak Daerah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,31
<b>B</b>	Retribusi Daerah	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70
<b>C</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00
<b>D</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	176.970.506.879,00	163.177.090.649,00	92,21
<b>II.</b>	PENDAPATAN TRANSFER	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53
<b>A.</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87
<b>B.</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10
	Total Pendapatan	1.965.295.001.998,00	1.910.196.168.052,00	97,20



b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.027.712.611.612,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.053.059.802,66 atau 96,02%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran 2023	Realisasi T.A 2023	Jumlah (Rp)	Capaian (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,027,712,611,612.00</b>	<b>1,947,053,059,802.66</b>	<b>(80.659.551.809,34)</b>	<b>96.02</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,511,664,542,507.00</b>	<b>1,453,409,582,381.98</b>	<b>(58.254.960.125,02)</b>	<b>96.15</b>
Belanja Pegawai	701,433,610,737.00	676,986,867,844.60	(24.446.742.892,40)	96.51
Belanja Barang dan Jasa	732,536,338,077.00	700,247,720,233.49	(32.288.617.843,51)	95.59
Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	(561.000.000,00)	88,07
Belanja Hibah	67,885,243,693.00	67,168,778,858.89	(716.464.834,11)	98.94
Belanja Bantuan Sosial	5,109,350,000.00	4,866,700,000.00	(242.650.000)	95.25
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>515,915,960,853.00</b>	<b>493,541,316,697.68</b>	<b>(22.374.644.155,32)</b>	<b>95.66</b>
Belanja Modal Tanah	4,659,332,850.00	4,474,680,000.00	(184.652.850)	96.04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,933,352,078.00	99,265,340,501.15	(1.668.011.576,85)	98.35
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133,918,553,470.00	125,625,416,264.67	(8.293.137.205,33)	93.81
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	270,730,334,650.00	258,451,537,963.86	(12.278.796.686,14)	95.46
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5,674,387,805.00	5,724,341,968.00	(49.954.163,00)	100.88
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>132,108,252.00</b>	<b>102,160,723.00</b>	<b>(29.947.529,00)</b>	<b>77.33</b>
Belanja Tidak Terduga	132,108,252.00	102,160,723.00	(29.947.529,00)	77.33
<b>SURPLUS/DEFISIT)</b>	<b>(62,417,609,614.00)</b>	<b>(36,856,891,750.66)</b>	<b>(25.560.717.862,34)</b>	<b>59.05</b>



Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.511.664.542.507,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.453.409.582.381,98 atau 96,15% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 701.433.610.737,00 dengan realisasi sebesar Rp. 676.986.867.844,60 atau 96,51%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 732.536.338.077,00 dengan realisasi sebesar Rp. 700.247.720.233,49 atau 95,59%.
- c) Belanja Bunga sebesar Rp. 4.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.139.515.445,00 atau 88,07%.
- d) Belanja Hibah sebesar Rp. 67.885.243.693,00 dengan realisasi sebesar Rp. 67.168.778.858,89 atau 98,94%.
- e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 5.109.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.866.700.000,00 atau 95,25%

2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 515.915.960.853,00 dengan realisasi sebesar Rp. 493.541.316.697,68 atau 95,66% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 4.659.332.850,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.474.680.000,00 atau 96,04%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 100.933.352.078,00 dengan realisasi sebesar Rp. 99.265.340.501,15 atau 98,35%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 133.918.553.470,00 dengan realisasi sebesar Rp. 125.625.416.264,67 atau 93,81%.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 270.730.334.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 258.451.537.963,86 atau 95,46%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5.674.387.805,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.724.341.968,00 atau 100,88%



3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar Rp. 132.108.252,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.160.723,00 atau 77,33% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 132.108.252,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.160.723,00 atau 77,33%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada pasal 2 yaitu :

Tabel 16.  
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.417.609.614,33	107.418.399.044,33	100%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100%
PEMBIAYAAN NETTO	62.417.609.614,33	62.418.399.044,33	100%

**6. Inovasi Daerah**

I.Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

## II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

**Misi Pertama: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh Stake Holder
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
- 4) Peningkatan perlindungan sosial
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
- 6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah



**Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1.) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai
- 2) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai
- 3) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai
- 4) Meningkatnya penerapan budaya melayu

**Misi Ketiga : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 9) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
- 10) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut



PEMKO DUMAI

1. Meningkatnya infrastruktur Kota
2. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana

**Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



PEMKO DUMAI

## PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Didalam Laporan ini dijelaskan tentang informasi utama penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Publik dengan muatan informasi sebagai berikut yakni Capaian Kinerja Makro, capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar, hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dan Inovasi daerah

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2023 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses sebagaimana yang diharapkan.

Dumai, Maret 2024

**WALIKOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**